

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

S O L U S I

Vol. 8 No. 1 Januari 2009

Penerimaan Auditor atas *Dysfunctional Audit Behavior*
Agusta Eka Baskara, Ardiani Ika S.

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai
Perusahaan-perusahaan Go Public di Indonesia (Studi Kasus pada
Perusahaan *Textile* dan *Apparel* di Bursa Efek Indonesia
Periode 2003-2007)
Arif Rahman Hakim, Indarto

Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil
Wahyu Hidayat

Perkembangan Filsafat Keilmuan Islam : Kelahiran,
Perkembangan dan Kemundurannya
Emrinaldi Nur DP

Pengukuran Kinerja dalam Instansi Pemerintah Daerah
Dian Indudewi

Pemasaran Relasional, Faktor Keberhasilan dalam
Mempertahankan Pelanggan
Dc. Kuswardani, Raully Sijabat

Orientasi Etika dan Faktor Eksternal : Kaitannya dengan
Independensi dan Kualitas Audit Seorang Auditor
Germana Causin EDW, Riski Aditya, Ardiani Ika S

Metode *Quality Function Deployment* untuk
Perpustakaan pada Perguruan Tinggi
Tri Endang Yani

Inflasi dan Pengangguran di Saat Krisis
Sri Purwantini

Rasionalisasi Privatisasi
Kesi Widjajanti

ISSN : 1412-5331

MAJALAH ILMIAH
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG

S O L U S I

Vol. 8 No. 1 Januari 2009

Penerimaan Auditor atas *Dysfunctional Audit Behavior*
Agusta Eka Baskara, Ardiani Ika S.

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai
Perusahaan-perusahaan Go Public di Indonesia (Studi Kasus pada
Perusahaan *Textile* dan *Apparel* di Bursa Efek Indonesia
Periode 2003-2007)
Arif Rahman Hakim, Indarto

Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil
Wahyu Hidayat

Perkembangan Filsafat Keilmuan Islam : Kelahiran,
Perkembangan dan Kemundurannya
Emrinaldi Nur DP

Pengukuran Kinerja dalam Instansi Pemerintah Daerah
Dian Indudewi

Pemasaran Relasional, Faktor Keberhasilan dalam
Mempertahankan Pelanggan
Dc. Kuswardani, Raully Sijabat

Orientasi Etika dan Faktor Eksternal : Kaitannya dengan
Independensi dan Kualitas Audit Seorang Auditor
Germana Causin EDW, Riski Aditya, Ardiani Ika S

Metode *Quality Function Deployment* untuk
Perpustakaan pada Perguruan Tinggi
Tri Endang Yani

Inflasi dan Pengangguran di Saat Krisis
Sri Purwantini

Rasionalisasi Privatisasi
Kesi Widjajanti

SOLUSI

Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis
Terbitan 3 bulan sekali
(Januari, April, Juli, Oktober)

Penerbit :
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Pelindung :
Rektor Universitas Semarang

Penanggungjawab :
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Dewan redaksi :
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE, ME (USM)
Prof. Dr. Imam Ghozali M.Com, Hons.Akt (UNDIP)
Prof. Supramono SE, MBA, DBA(UKSW)
Prof. Dr. Dra. Sulastri ME. M.kom (UNISRI)
Dr. Ir. Kesi Widjajanti SE MM (USM)

Redaktur Pelaksana :
Andy Kridasusila SE MM
Ardiani Ika S., SE MM Akt
Adijati Utaminingsih SE MM

Sekretaris Redaksi :
Amerty

Tata Usaha :
Ali Arifin

Alamat Penerbit/Redaksi :
Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)
Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272
SEMARANG – 50196

Terbit Pertama kali : Juli 2002

KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam, wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

SOLUSI

Vol. 8 No. 1 Januari 2009

ISSN : 1412-5331

DAFTAR ISI

1. Penerimaan Auditor atas <i>Dysfunctional Audit Behavior</i> <i>Agusta Eka Baskara, Ardiani Ika S.</i>	1 - 7
2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan-perusahaan Go Public di Indonesia (Studi Kasus pada Perusahaan <i>Textile</i> dan <i>Apparel</i> di Bursa Efek Indonesia Periode 2003-2007)..... <i>Arif Rahman Hakim, Indarto</i>	9 - 23
3. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil <i>Wahyu Hidayat</i>	25 - 28
4. Perkembangan Filsafat Keilmuan Islam : Kelahiran, Perkembangan dan Kemundurannya <i>Emrinaldi Nur DP</i>	29 - 38
5. Pengukuran Kinerja dalam Instansi Pemerintah Daerah <i>Dian Indudewi</i>	39 - 45
6. Pemasaran Relasional, Faktor Keberhasilan dalam Mempertahankan Pelanggan <i>Dc. Kuswardani, Raully Sijabat</i>	47 - 64
7. Orientasi Etika dan Faktor Eksternal : Kaitannya dengan Independensi dan Kualitas Audit Seorang Auditor <i>Germana Causin EDW, Riski Aditya, Ardiani Ika S</i>	65 - 70
8. Metode <i>Quality Function Deployment</i> untuk Perpustakaan pada Perguruan Tinggi <i>Tri Endang Yani</i>	71 - 80
9. Inflasi dan Pengangguran di Saat Krisis <i>Sri Purwantini</i>	81 - 84
10. Rasionalisasi Privatisasi <i>Kesi Widjajanti.</i>	85 - 92

Pengukuran Kinerja dalam Instansi Pemerintah Daerah

Oleh:

Dian Indudewi

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang

Abstraksi

Laporan keuangan merupakan salah satu media akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat menilai dan mengkritisi kinerja aparat pemerintah daerah baik dari sisi pertanggungjawaban anggaran maupun kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Hasil evaluasi yang dilakukan BPK menunjukkan masih kurangnya peningkatan kinerja dari instansi pemerintah daerah. Pengevaluasian tersebut dapat dibantu dengan adanya pengukuran kinerja yang jelas sehingga akuntabilitas instansi pemerintah daerah dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: akuntabilitas, ukuran kinerja, *value for money*

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasari UU No. 22 Tahun 1999 *juncto* UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 *juncto* UU No. 33 Tahun 2004 menunjukkan usaha pemerintah untuk memperbaiki sistem pemerintahan lama dan mewujudkan *good government governance*. Salah satu bentuk *good governance* adalah prinsip akuntabilitas yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Prinsip akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah kepada masyarakat. Publikasi laporan keuangan sekaligus memenuhi prinsip transparansi dimana pemerintah secara terbuka mempertanggungjawabkan semua kegiatannya dalam satu periode tertentu. Di lain pihak, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan pengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak mensejahterakan rakyat.

Laporan keuangan pokok pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (PP 24/2005). Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Sedangkan catatan atas laporan keuangan membantu para pengguna untuk memahami isi laporan keuangan dan untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain empat laporan pokok diatas, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Laporan kinerja keuangan memuat informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasar klasifikasi fungsional dan ekonomi, serta surplus atau defisit. Sedangkan laporan perubahan ekuitas menunjukkan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (PP 24/2005). Untuk itu, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah merupakan unsur penting sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK bertugas memeriksa dan menilai kewajaran dan kelayakan dari suatu laporan keuangan baik Dalam rangka otonomi daerah, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan unsur penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas. Permendagri 13/2006 mewajibkan pemerintah daerah untuk melaporkan pertanggungjawabannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah merupakan faktor penting karena dengan penyampaian laporan keuangan masyarakat dapat menilai dan mengkritisi kinerja pemerintahnya.

Pada akhir pemeriksaannya, BPK mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan pemerintah yang diperiksanya. Pada semester akhir kedua tahun 2008 BPK telah memeriksa 191 laporan

keuangan pemerintah daerah dengan opini *disclaimer* atas 72 LKPD, opini tidak wajar atas 8 LKPD, opini wajar dengan pengecualian atas 110 SKPD, dan opini wajar tanpa pengecualian atas 1 LKPD. Pemberian opini diluar wajar tanpa pengecualian disebabkan beberapa faktor seperti lemahnya sistem pengendalian intern (SPI) maupun ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara. Hasil ini mengindikasikan bahwa masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja dalam instansi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja diperlukan untuk proses evaluasi. Mahmudi (2005) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Pembahasan

1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (PP 24/2005).

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan (PP No. 24/2005):

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiataannya dan mencukupi kebutuhan kasnya

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
3. Pemasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan
1. Lemahnya sistem pengendalian intern (SPI)

SPI meliputi pengendalian atas aspek organisasi, kebijakan, personalia, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan intern. Kelemahan-kelemahan yang menjadi temuan oleh BPK antara lain:

 - a. Penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah antara lain pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam PP 58/2005 belum dilakukan
 - b. Belum memiliki sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang memadai. Hal ini mengakibatkan proses pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku
 - c. Perencanaan pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya dilakukan, antara lain perencanaan APBD tidak berbasis kinerja, APBD terlambat disahkan sehingga penyerapan anggaran tidak optimal, dan penganggaran pendapatan daerah tidak sepenuhnya didukung dengan data potensi pendapatan yang nyata
 - d. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah belum ditetapkan sehingga pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah tidak tertib
 - e. Pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum memadai, antara lain transaksi keuangan daerah belum seluruhnya dicatat dalam laporan keuangan, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan penyusunan LKPD yang belum seluruhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
 - f. Pengawasan oleh Badan Pengawas Provinsi/Kabupaten/Kota belum optimal dan sering dijumpai temuan-temuan BPK yang berulang dan lambat ditindaklanjuti
 2. Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengakibatkan kerugian antara lain:

 - a. Kerugian Negara/Daerah

UU No.1/2004 pasal 1 (22) menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah terdiri dari 8 jenis temuan yaitu:

 1. Tidak terselesaikannya rekanan pengadaan barang/jasa
 2. Adanya kelebihan pembayaran
 3. Kurangnya volume pengadaan barang dan/jasa
 4. Adanya *mark up*
 5. Pembayaran honorarium atau biaya perjalanan dinas ganda
 6. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak
 7. Pembebanan tidak sesuai atau melebihi ketentuan
 8. Macetnya pengembalian dana kepada bank pemerintah
 - b. Potensi kerugian daerah

Ketidapatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah yaitu:

 1. Hasil pengadaan barang jasa tidak sesuai atau kurang dari kontrak akan tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya
 2. Pinjaman atau dana bergulir berpotensi tak tertagih
 3. Penggunaan asset oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan
 4. Pengelolaan rekening yang tidak tertib
 - c. Kekurangan penerimaan

Ketidapatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terdiri atas 3 temuan yaitu:

 1. Pengelolaan penerimaan daerah tidak melalui mekanisme APBD

2. Kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak dipungut dan disetor ke kas daerah
3. Penerimaan Negara (PPN dan PPh) yang belum/terlambat disetor ke kas negara
- d. Uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan
Ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan terdiri dari dua jenis temuan yaitu, uang persediaan tidak sesuai dengan ketentuan dan uang belum/terlambat/tidak dipertanggungjawabkan
- e. Administrasi
Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah administrasi terdiri atas empat jenis temuan, yaitu:
 1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah)
 2. Penyertaan modal pemerintah daerah belum didukung dengan bukti
 3. Kepemilikan asset tanah belum didukung dengan bukti kepemilikan yang sah
 4. Asset tetap tidak diketahui keberadaannya
- f. Ketidakhematan/pemborosan
Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan/pemborosan terdiri atas dua jenis temuan yaitu, pengeluaran yang tidak dianggarkan dan pemberian bantuan kepada instansi vertikal
- g. Ketidakefektifan
Ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan terdiri atas tiga jenis temuan yaitu:
 1. Pengadaan tidak dapat dimanfaatkan/anggaran tidak dapat direalisasikan
 2. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/peruntukan
 3. Penggunaan anggaran tidak sesuai ketentuan
- h. Lain/lain
Ketidakpatuhan yang mengakibatkan masalah-masalah selain yang telah disebutkan diatas antara lain adanya penyimpanan sementara dana kas (titipan) dan penyelesaian hutang pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang berlarut-larut.
Berikut ringkasan data hasil IHSP BPK terkait dengan temuan-temuan selama semester II tahun 2008

No	Kelp Temuan	Juml Kasus	Nilai (juta Rp)
1.	Kerugian daerah	556	310.860
2.	Potensi kerugian daerah	126	1.319.005
3.	Kekurangan penerimaan	629	2.200.620
4.	Uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan	212	1.496.495
5.	Administrasi	411	-
6.	Ketidakhematan/pemborosan	227	205.119
7.	Ketidakefektifan	475	2.486.309
8.	Lain-lain	415	1.916.856

4. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran/penilaian kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik sektor publik maupun swasta. Menurut De Bruijn (2002) dan Mahmudi (2005), tujuan pengukuran/penilaian kinerja dalam sektor publik antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Ditinjau dari perspektif pengendalian internal, sistem pengukuran kinerja didesain untuk memonitor implementasi rencana-rencana organisasi, emntentukan kapan rencana tersebut berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya. Sistem pengukuran kinerja untuk memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur dan melaporkan kinerja, serta untuk memahami bagaimana proses kinerja mempengaruhi pembelajaran organisasi.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya
Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfir organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Atmosfir tersebut dapat terwujud dengan perbaikan kinerja yang dilakukan secara terus menerus. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang.
 4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*
Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward* (kenaikan gaji, tunjangan, promosi), atau *punishment* (pemutusan kerja, penundaan promosi, teguran). Sistem manajemen kinerja modern diperlukan untuk mendukung sistem gaji berbasis kinerja (*performance based pay*). Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan *reward*, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.
 5. Memotivasi pegawai
Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.
 6. Menciptakan akuntabilitas publik
Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.
5. Manfaat Pengukuran kinerja
Wyne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima manfaat apa adanya pengukuran kinerja entitas pemerintahan, yaitu :
1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.
Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu.
 2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal
Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas diseluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas.
 3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas politik
Publikasi laporan sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.
 4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.
Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan program.
 5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.
Dalam hal ini pemerintah mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan publik.
6. Konsep *Value For Money*
Konsep pengukuran kinerja di sektor publik mengacu pada konsep *value for money* (VFM). Konsep *value for money* terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:
1. Ekonomi

Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang / kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Organisasi harus memastikan bahwa dalam perolehan sumber daya input tidak terjadi pemborosan.

2. Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output.

3. Efektivitas

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Konsep VFM menekankan pada hasil atau pelayanan terhadap publik. Organisasi tidak hanya berfokus pada pendapatan saja, tetapi bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap publik. Untuk mengukur tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas diperlukan pengembangan indikator kinerja dalam desain sistem pengukuran kinerja organisasi (Greiling, 2005). Mahmudi (2005) mengatakan bahwa indikator kinerja hendaknya memiliki beberapa karakteristik, antara lain sederhana dan mudah dipahami; dapat diukur; dapat dikuantifikasikan (rasio, persentase, angka); dikaitkan dengan standar atau target kinerja; berfokus pada *customer service*, kualitas, efisiensi, dan dikaji secara teratur.

7. Peran Indikator Kinerja

Salah satu tahap penting dalam mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi adalah menetapkan indikator kinerja. Mahmudi (2005) mengungkapkan beberapa karakteristik dalam menetapkan indikator kinerja:

1. Sederhana dan mudah dipahami
2. Dapat diukur
3. Dapat dikuantifikasikan (dalam bentuk angka, rasio, persentase, angka)
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja
5. Berfokus pada pelayanan publik, kualitas dan efisiensi
6. Dikaji secara teratur

LAN (2004) memberikan beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam rangka penetapan kinerja, antara lain:

1. Mereview kembali rencana program yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), permintaan/keinginan stakeholders, barang dan jasa yang akan dihasilkan, pengguna program, kebutuhan konsumen, dan proses kegiatan yang akan dilakukan.
2. Identifikasi elemen-elemen program
Identifikasi elemen-elemen program dapat membantu instansi pemerintah dalam mengembangkan indikator kinerja yang baik.
3. Rancangan indikator kinerja
Rancangan indikator kinerja terdiri dari indikator masukan, indikator proses, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak.
4. Analisis organisasi dan lingkungan
Pertimbangan faktor di luar lingkungan organisasi antara lain ekonomi, teknologi dan politik. Hal ini penting dilakukan karena faktor lingkungan dapat mempengaruhi program dan kegiatan organisasi. Apabila organisasi menghadapi kendala, bukan tidak mungkin akan mempengaruhi pemilihan indikator kinerja.

Kesimpulan

Pengukuran kinerja merupakan alat yang penting dalam melakukan proses evaluasi kinerja. Ukuran kinerja diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah daerah. Konsep *value for money* yang menekankan pada elemen ekonomi, efisiensi dan efektifitas memacu instansi pemerintah daerah untuk berkinerja secara efisien dan efektif sesuai dengan dana yang tersedia dimana hasilnya diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di daerahnya. Dengan demikian,

pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan dapat dihindari dan kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan.

Daftar Pustaka :

De Bruijn, H., 2002, **Performance Measurement in the Public Sector: Strategies to Cope with the Risks of Performance Measurement**, International Journal of Public Sector Management, Vol 15 Nos 6/7, pp. 578-594.

Greiling, D., 2005, **Performance Measurement in the Public Sector: the German Experience**, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54 No. 7, pp. 551-567.

IHPS BPK Tahun 2008, www.bpk.go.id

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2004, **Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, Edisi ke-2, LAN, Jakarta.

Mahmudi, 2005, **Manajemen Kinerja**, Sektor Publik, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2002, **Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta.

Mulyadi, 1998, **Auditing**, Salemba Empat: Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah